DINAMIKA KEPENTINGAN TIONGKOK DI LAOS *GOLDEN TRIANGLE SPECIAL ECONOMIC ZONE* DALAM PERSPEKTIF GEOPOLITIK NICHOLAS SPYKMAN

Oleh
Natalie Desta Karunia[1], Suryo Sakti Hadiwijoyo[2], Triesanto Romulo Simanjuntak[3]
[1,2,3]Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
E-mail: [1]372021014@student.uksw.edu

Article History:
Received: 15-10-2025
Revised: 08-11-2025
Accepted: 18-11-2025

Keywords:
China, Laos GTSEZ, Geopolitics, Nicholas Spykman, Rimland Theory

Abstract: *This study aims to analyze the dynamics of China's interest in the Laos Golden Triangle Special Economic Zone (GTSEZ) through the geopolitical perspective of Nicholas Spykman. The development of the Laos GTSEZ in the border area between Thailand, Laos, and Myanmar represent not only an economic project but also a strategic instrument for expanding China's geopolitical influence in Southeast Asia. This research employs a qualitative method with a descriptive-explanatory approach. The result indicates that the development of the Laos GTSEZ carries a dual dimension, functioning both as an economic project and as a geopolitical instrument. From Spykman's geopolitical perspective, the Laos GTSEZ reflects China's strategy to dominate the Southeast Asian rimland as part of its effort to maintain and expand its global influence. Therefore, the establishment of the Laos GTSEZ has implications not only for regional economic growth but also for shifting geopolitical power in Southeast Asia.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, lonjakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah menjadikannya sebagai salah satu kekuatan besar dalam dinamika global. Pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam ekonomi internasional tidak hanya berdampak pada arus perdagangan dan investasi global, tetapi juga mengubah konfigurasi geopolitik dunia(Desai, 2021). Salah satu implikasi dari perubahan ini adalah terjadinya pergeseran fokus wilayah strategis dari *Heartland* yaitu Eurasia menuju *Rimland* yaitu pesisir Asia. Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan dalam pemetaan wilayah potensial untuk kepentingan ekonomi dan politik global(Dahal, 2024). Dalam konteks geopolitik global, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan strategis yang menarik perhatian kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk memperluas pengaruh mereka melalui berbagai kebijakan ekonomi dan infrastruktur(Zulkarnain et al., 2018). Amerika Serikat, terkhusus pada masa kepemimpinan Barack Obama, membentuk kebijakan *Pivot to Asia* untuk memperkuat kehadirannya di kawasan ini(Wardhana, 2018). Sementara itu, Tiongkok mengadopsi pendekatan ekspansionis dengan menggelontorkan investasi secara masif dalam berbagai mega proyek terkait infrastruktur dan pengembangan ekonomi di beberapa wilayah perbatasan(Setiawati, 2023). Salah satu proyek pengembangan ekonomi tersebut menyasar kawasan perbatasan Asia Tenggara yaitu *Golden Triangle*.

Golden Triangle merujuk pada kawasan perbatasan tiga negara yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar yang lekat akan imagenya sebagai pusat produksi dan perdagangan opium yang menguntungkan secara ekonomi karena menjadi salah satu daerah penghasil paling produktif, namun juga memunculkan dampak negatif bagi stabilitas regional(Ribó, 2022). Dinamika pengelolaan kawasan ini kemudian mengalami perubahan secara signifikan ketika muncul proyek pembangunan ekonomi pada tahun 2007 di provinsi Borkeo di barat laut Laos yang berbatasan dengan *Golden Triangle.* Sebelum menjadi *Special Economic Zone,* kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi dan pariwisata. Pengembangan proyek pembangunan ekonomi ini terjalin melalui kontrak konsesi selama 99 tahun antara pemerintah Laos dan *Kings Romans Group (Dok Ngiew Kham)* yang merupakan perusahaan swasta dari Tiongkok(Center, 2021).

Pada tahun 2010 pemerintah Laos mengeluarkan Keputusan tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Tertentu di Republik Demokratik Rakyat Laos No:443/PM sebagai dasar bagi sistem *check and balances* dalam tata pelaksanaan *Special Economic Zone.* Penerbitan peraturan ini penting karena di Laos terdapat setidaknya 13 wilayah yang dikembangkan menjadi *Special Economic Zone* (Lao PDR Prime Ministers Office, 2010). Dalam konsesi yang telah disepakati sebelumnya, KRG diberi wewenang oleh pemerintah Laos untuk mengelola wilayah seluas 10.000 hektar dengan total investasi sebesar $ 900 juta. Sejatinya, tujuan dari kesepakatan pembangunan Laos *GTSEZ* adalah untuk mengeksplorasi strategi alternatif pemulihan ekonomi regional. Akan tetapi, Laos *GTSEZ* yang semula dibentuk dengan tujuan modernisasi melalui penarikan investasi asing guna membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar *Golden Triangle,* pada implementasinya justru lebih condong memberikan potensi ancaman bagi stabilitas regional ketiga negara (Sims, 2017).

Terdapat sejumlah implikasi dari pengembangan proyek Laos *GTSEZ* bagi Thailand, Myanmar, dan Laos sendiri. Di Thailand, peningkatan konektivitas lintas batas memfasilitasi aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia, serta memicu perubahan sosial ekonomi akibat masuknya pekerja dan wisatawan Tiongkok (Chantrawarin, 2024). Myanmar menghadapi kerentanan tenaga kerja, karena pekerja migran dieksploitasi dalam kondisi kerja yang tidak aman dengan pengawasan minim. Di Laos, dominasi investor asing menciptakan ketimpangan ekonomi, lemahnya regulasi membuka ruang bagi praktik ilegal, dan muncul resistensi dari masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan. Secara keseluruhan, *GTSEZ* tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi juga instrumen strategis Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik di Asia Tenggara, dengan ketergantungan Laos terhadap investasi Tiongkok yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan (Luzzu, 2023).

Dengan melihat berbagai dampak dan kepentingan yang ada, maka dapat dipahami bahwa Laos GTSEZ tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik yang memperkuat pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Melalui dominasi investasi dan pembangunan infrastruktur, Tiongkok memperdalam ketergantungan ekonomi negara-negara di kawasan Mekong sehingga membatasi ruang kebijakan independen Thailand, Laos, dan Myanmar. Dalam perspektif teori geopolitik Nicholas Spykman, Laos *GTSEZ* mencerminkan strategi Tiongkok dalam menguasai wilayah *rimland* untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperluas dominasi regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Laos *GTSEZ* digunakan sebagai alat

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

ekspansi ekonomi dan politik Tiongkok serta implikasinya bagi stabilitas kawasan. Dengan memahami dinamika ini, kajian diharapkan dapat memperkaya analisis terhadap pola dominasi Tiongkok dan dampak jangka panjang ketergantungan ekonomi negara-negara kecil di Asia Tenggara.

LANDASAN TEORI

Konsep *national interest* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kepentingan nasional Tiongkok melalui perusahaan swasta yang hadir dalam pengembangan proyek Laos *GTSEZ.* Konsep *national interest* merupakan pijakan dalam memahami perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam kondisi tanpa otoritas supranasional, negara berupaya memenuhi kebutuhan fundamental seperti keamanan, stabilitas politik, dan kesejahteraan ekonomi (Wijatmadja, 2015). Pemikiran realis, seperti yang dikemukakan Morgenthau, menjelaskan bahwa setiap tindakan negara didorong oleh kepentingan strategis yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan politik (Morgenthau, 1949). Dalam konteks penelitian ini, kepentingan nasional Tiongkok di Laos *GTSEZ* tidak hanya berupa perluasan akses ekonomi dan integrasi jaringan perdagangan, tetapi juga mencakup upaya memperkuat posisi politik dan keamanan Tiongkok di wilayah Mekong. Dengan demikian, *national interest* menjadi lensa analitis yang relevan untuk menilai motivasi Tiongkok dalam berinvestasi dan mengonsolidasikan pengaruhnya di kawasan perbatasan tersebut.

Untuk menjelaskan dimensi geopolitik dari keterlibatan Tiongkok, penelitian ini menggunakan *Rimland Theory* yang dikembangkan oleh Nicholas Spykman. Spykman menempatkan *rimland* yang mencakup wilayah pesisir Eurasia termasuk Asia Tenggara sebagai zona strategis yang menentukan distribusi kekuatan global. Beliau berargumen bahwa penguasaan *rimland* lebih penting daripada *heartland* karena wilayah ini merupakan jalur perdagangan internasional dan titik pertemuan kekuatan maritim secara kontinental (Astarita & Marconi, 2023). Berdasarkan teori ini, Asia Tenggara memiliki nilai strategis yang tinggi dalam kompetisi geopolitik kekuatan besar. Lokasi Laos *GTSEZ* yang berada di perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar menjadikannya bagian dari *rimland* Asia. Dengan demikian, kehadiran Tiongkok di kawasan ini dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kontrol atas ruang strategis yang memungkinkan proyeksi kekuatan ekonomi sekaligus politik.

Dari integrasi konsep *national interest* dan teori geopolitik Nicholas Spykman yaitu *Rimland Theory,* kerangka pemikiran penelitian ini melihat Laos *GTSEZ* sebagai instrumen strategis yang merealisasikan kepentingan ekonomi dan politik Tiongkok. Zona ini tidak hanya dirancang untuk menarik investasi asing dan mendorong modernisasi kawasan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat pengaruh Tiongkok melalui perluasan jaringan infrastruktur, penetrasi pasar, serta keterikatan ekonomi negara-negara di sekitar *Golden Triangle.* Dengan memanfaatkan posisi geografis Laos yang berada di koridor *rimland* Asia Tenggara, Tiongkok dapat mengonsolidasi kontrol atas arus barang, modal, dan aktivitas lintas batas, sehingga memperbesar pengaruhnya dalam arsitektur geopolitik regional. Oleh karena itu, keberadaan Laos *GTSEZ* dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk mengukuhkan posisi sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara melalui mekanisme ekonomi yang dibingkai dalam tujuan geopolitik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif untuk menganalisis kepentingan Tiongkok di Laos *Golden Triangle Special Economic Zone (GTSEZ)* melalui perspektif geopolitik Nicholas Spykman (Abdussamad, 2021). Data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan, serta berita dari media kredibel terkait dinamika geopolitik kawasan Mekong. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan (Murdiyanto, 2020). Unit amatan penelitian ini adalah penetapan Laos *GTSEZ* sebagai zona ekonomi khusus di perbatasan Laos, sedangkan unit analisisnya berfokus pada manifestasi strategi geopolitik Tiongkok di Laos *GTSEZ* sesuai dengan *Rimland Theory.* Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan pemahaman sistematis mengenai bagaimana Laos *GTSEZ* berfungsi sebagai instrumen strategis dalam perluasan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah mengubah dinamika geopolitik global dan menggeser fokus strategis menuju kawasan *rimland,* termasuk Asia Tenggara. Salah satu manifestasi ekspansi tersebut adalah modernisasi Laos *GTSEZ* di perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar. Melalui skema investasi infrastruktur dan konsesi jangka panjang, Tiongkok memperluas pasar sekaligus memperkuat pengaruh geopolitiknya. Keterlibatan perusahaan swasta Tiongkok tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mengonsolidasikan posisi strategis Tiongkok di wilayah perbatasan. Transformasi kawasan yang sebelumnya terisolasi dan dikenal sebagai pusat produksi opium menjadi pusat ekonomi modern menunjukkan dampak ganda proyek ini, yang membawa peluang pembangunan namun juga menimbulkan implikasi kompleks bagi stabilitas regional.

Dinamika Perkembangan Laos *Golden Triangle Special Economic Zone*

Kawasan *Golden Triangle* memiliki sejarah panjang sebagai pusat produksi dan perdagangan opium akibat kondisi geografisnya yang terpencil serta lemahnya kontrol negara di perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar (Ammar, 2023). Migrasi produksi opium ke kawasan ini dipicu oleh kebijakan pengetatan di Yunnan pada 1950-an, sehingga kelompok etnis pegunungan seperti Hmong, Lahu, Lisu, dan Akha memanfaatkan wilayah tersebut sebagai basis produksi (Leong, 2021). Sebagai respons, ketiga negara mulai mengembangkan strategi pembangunan alternatif. Thailand menginisiasi proyek kerajaan sejak 1969 dan memperkuat pengendalian narkoba melalui *Office of the Narcotics Control Board* pada 1976 dengan dukungan *United Nation Office on Drugs and Crime*. Myanmar menghadapi tantangan lebih besar karena keterlibatan milisi bersenjata dalam ekonomi opium. Sementara itu, Laos melaksanakan program penanggulangan opium melalui *National Drug Control Programme* (1994–2000) hingga *National Drug Control Master Plan* (2009–2013) untuk mendorong pembangunan alternatif dan memperkuat kebijakan pengendalian narkoba (Chouvy & Meissionnier, 2024).

Sebagai upaya merebranding *Golden Triangle* dari citra kawasan perdagangan opium, pemerintah Laos mengembangkan strategi ekonomi baru melalui skema *public-private*

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

partnerships (Phommachanh, 2024). Pada 2007, Laos menjalin kerja sama dengan *Kings Romans Group (KRG)* asal Tiongkok dan memberikan konsesi lahan 10.000 hektar di Provinsi Bokeo selama 99 tahun, dengan 3.000 hektar ditetapkan sebagai zona bebas bea yang kemudian menjadi Laos *GTSEZ* (International Crisis Group, 2023). Kawasan ini diarahkan untuk menarik investasi asing di sektor pariwisata, hiburan dan perdagangan lintas batas. Untuk mendukung pengelolaan kawasan, pemerintah Laos membangun kerangka regulatif melalui *Decree* No. 443/PM (2010), namun meningkatnya aktivitas investasi menuntut regulasi yang lebih komprehensif. Sebagai respons, Laos mengesahkan *Law on Investment Promotion* No. 14/NA (2016) dan *Decree on SEZ* No. 188/PM (2018) guna memperkuat tata kelola dan menyesuaikan kebijakan investasi dengan standar internasional (Inthaphonh, 2021).

Dalam konteks jangka panjang, Laos *GTSEZ* diproyeksikan sebagai pusat urban baru yang terintegrasi, berfungsi sebagai simpul logistik dan perdagangan internasional dalam koridor *Greater Mekong Subregion.* Visi ini mencakup pengembangan sektor jasa, manufaktur ringan, pengelolaan hasil pertanian, pariwisata, budaya, real estat, dan perbankan yang semuanya diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan dan mempercepat transformasi struktural kawasan perbatasan (SEZO, 2021). Dengan demikian, pembangunan Laos *GTSEZ* bukan sekedar upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan instrumen strategis untuk mengintervensi dan merestrukturisasi lanskap ekonomi *Golden Triangle,* rebranding citranya melalui model ekonomi legal meskipun masih menyisakan perdebatan terkait transparansi dan dampak sosial-politik.

Kepentingan Ekonomi Tiongkok di Laos *Golden Triangle Special Economic Zone*

Pengembangan proyek Laos *GTSEZ* telah merekonstruksi kawasan *Golden Triangle* dari wilayah yang sebelumnya terisolasi menjadi zona ekonomi modern melalui pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor pariwisata. Meskipun demikian, keberadaan Laos *GTSEZ* belum mampu membebaskan *Golden Triangle* dari berbagai aktivitas ilegal yang masih saja berlangsung seperti pencucian uang, penyelundupan satwa liar, hingga perdagangan manusia (Technical Policy Brief, 2024). Maka dalam konteks ini, penting untuk meninjau aktor dominan di balik proyek pengembangan ekonomi Laos *GTSEZ*. Tinjauan historis dari pengembangan kawasan ini menunjukkan bahwa Tiongkok, melalui peran aktif perusahaan swasta *Kings Romans Group (KRG),* telah menjadi aktor dominan dalam proses pembangunan infrastruktur di Laos *GTSEZ*(Campbell & Tanakasempipat, 2024). Sehingga, untuk mengetahui dinamika hadirnya kepentingan Tiongkok di kawasan ini, penting untuk terlebih dahulu memahami kepentingan ekonomi yang melandasi keterlibatannya dalam pengembangan kawasan *Golden Triangle.*

Pembangunan infrastruktur berskala besar oleh perusahaan swasta Tiongkok di kawasan *Golden Triangle* menjadi fondasi utama kepentingan ekonomi Tiongkok dalam pengembangan Laos *GTSEZ.* Selain diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat lokal, proyek-proyek tersebut memperkuat posisi geoekonomi Tiongkok di wilayah perbatasan(Rippa, 2019). Infrastruktur yang dibangun mencakup jalan raya, pelabuhan, kawasan komersial, perumahan pekerja, serta fasilitas administratif yang dimulai dari konsesi 99 tahun untuk pendirian kasino dan hotel. Proyek penting lainnya adalah

pembangunan Pelabuhan Ban Mom oleh *Osiano Trading Company* pada 2020, yang menjadi titik kunci arus perdagangan antara Tiongkok, Thailand, Laos, dan Myanmar (Laotian Times, 2020). Integrasi ini diperkuat dengan pembangunan Bandara Internasional Bokeo pada 2024, yang didanai sekitar 175 juta USD dan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas Laos *GTSEZ* dengan pasar internasional (Lao news Agency, 2024). Secara keseluruhan, rangkaian proyek ini semakin mengintegrasikan Laos *GTSEZ* ke dalam jaringan logistik dan ekonomi Tiongkok.

Selain membuka koridor baru, pembangunan Laos *GTSEZ* menunjukkan kepentingan ekonomi Tiongkok melalui skema investasi swasta yang memanfaatkan regulasi longgar dan biaya operasional rendah. Kawasan ini memberikan insentif signifikan seperti pembebasan pajak, keringanan bea impor–ekspor, serta kemudahan izin lahan yang menarik investor Tiongkok, terutama dalam sektor perjudian, hiburan malam, dan pariwisata kasino yang dilarang di Tiongkok daratan (International Crisis Group, 2024). Kondisi tersebut menjadikan *GTSEZ* sebagai *gray zone* yang memungkinkan beroperasinya aktivitas bisnis semi-legal akibat lemahnya sistem hukum dan rendahnya pengawasan pemerintah Laos (Ho et al., 2025). Dominasi *Kings Romans Group* di bawah Zhao Wei yang dikategorikan Amerika Serikat sebagai organisasi kriminal transnasional semakin memperkuat karakter abu-abu kawasan ini (Reuters, 2018). Melalui celah regulasi dan kontrol lokal yang lemah, Laos *GTSEZ* berfungsi sebagai perluasan teritorial ekonomi Tiongkok, memudahkan masuknya modal, tenaga kerja, dan konsumen asal Tiongkok. Fasilitas seperti bandara dan pelabuhan semakin mengakselerasi arus wisata serta kegiatan ekonomi Tiongkok, menjadikan Laos *GTSEZ* platform strategis bagi perluasan pasar dan pengaruh ekonomi Tiongkok di Mekong (Huaxia, 2024).

Hal lain yang juga menjadi kepentingan Tiongkok di Laos *GTSEZ* adalah menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium ekonomi untuk menguji model-model investasi lintas batas yang lebih fleksibel. Pada proses pengembangannya, Laos *GTSEZ* menawarkan pengurangan pajak serta regulasi pemerintah yang fleksibel untuk menarik investor maupun wisatawan asing. Sehingga aktor swasta, serta jaringan investor Tiongkok dapat menegosiasi aturan-aturan lokal agar menjadi lebih fleksibel untuk menjalankan proyek-proyek komersial. Dominasi investor swasta dari Tiongkok di Laos *GTSEZ* tentunya akan memunculkan berbagai tantangan dan resiko bagi kawasan ini. Ketimpangan pembangunan antara investor asing dan masyarakat lokal kian melebar (Li & Wang, 2021). Banyaknya proyek infrastruktur dan bisnis dikembangkan tanpa konsultasi publik yang memadai, bahkan disertai penggusuran dan sengketa kompensasi tanah. Kemudian, ketergantungan ekonomi terhadap satu mitra utama beresiko melemahkan kedaulatan nasional dan memperburuk posisi tawar negara dalam diplomasi regional.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh Tiongkok dari keterlibatannya di Laos *GTSEZ* tidak hanya mencakup keuntungan finansial saja melainkan turut menciptakan jaringan ketergantungan ekonomi-politik baru di kawasan Mekong. Investasi besar-besaran, dominasi mata uang, kendali terhadap infrastruktur, serta pengaruh sosial budaya menjadi dasar kuat dari strategi ekonomi Tiongkok (Pedroletti, 2025). Keterlibatan Tiongkok di Laos *GTSEZ* tidak terpisah dari adanya kepentingan ekonomi yang lebih besar dari sekedar bantuan pengembangan ekonomi bagi wilayah dan masyarakat lokalnya saja. Terdapat agenda perluasan jangkauan politik menuju

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Asia Tenggara melalui instrumen yang menyatukan negara sebagai aktor publik dengan korporasi sebagai aktor swasta(Akartuna, 2025).

Kepentingan Politik Tiongkok di Laos *Golden Triangle Special Economic Zone*

Meskipun Laos *GTSEZ* digambarkan sebagai proyek pembangunan yang didorong oleh kepentingan ekonomi dengan tujuan mendorong modernisasi kawasan. Akan tetapi apabila dilihat secara lebih mendalam dapat dipahami bahwa bantuan proyek pembangunan ekonomi oleh investor swasta dari Tiongkok tersebut mencerminkan agenda-agenda politik yang lebih mendalam. Laos *GTSEZ* tidak hanya berfungsi sebagai mesin ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik yang strategis. Di balik gedung-gedung kasino, properti mewah, dan infrastruktur megah yang dibangun oleh investor Tiongkok, terdapat agenda politik yang ambisius (Sims, 2017). Melalui proyek Laos *GTSEZ* ini, Tiongkok secara efektif memproyeksikan pengaruhnya, menegaskan kontrol atas wilayah perbatasan dan menguji model tata kelola baru yang menguntungkan bagi keamanan dan visinya tentang pembentukan tatanan regional baru (Sun et al., 2022). Oleh karena itu, untuk memahami peran Tiongkok sepenuhnya di Laos *GTSEZ,* kita perlu beralih dari lensa ekonomi ke analisis yang lebih luas dengan memahami agenda politik dibalik proyek modernisasi.

Modernisasi Laos *GTSEZ* menjadi instrumen strategis bagi Tiongkok untuk memperkuat kepentingan politiknya di kawasan *Golden Triangle.* Upaya modernisasi ini tidak hanya mentransformasi wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai pusat aktivitas ilegal, tetapi juga memperluas legitimasi operasi perusahaan swasta Tiongkok, terutama *Kings Romans Group.* Keterlibatan perusahaan tersebut sejalan dengan *Going Out Policy* yang mendorong ekspansi modal Tiongkok ke luar negeri guna memperluas akses pasar, sumber daya, dan pengaruh politik (Wang, 2016). Meskipun kebijakan ini tidak mendukung secara langsung proyek GTSEZ, fleksibilitasnya membuka ruang bagi investasi swasta tanpa pengawasan ketat, sehingga memungkinkan berkembangnya proyek kasino di kawasan tersebut. Dominasi *Kings Romans Group* dalam manajemen Laos *GTSEZ* mencerminkan praktik *extraversion strategy,* di mana modal ekonomi digunakan untuk memperkuat pengaruh politik Tiongkok di wilayah perbatasan. Melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, Laos *GTSEZ* berfungsi sebagai gerbang strategis bagi ekspansi ekonomi dan politik Tiongkok menuju Asia Tenggara(Tan, 2017).

Hal lain yang juga menjadi kepentingan politik Tiongkok di Laos *GTSEZ* melalui aktor swastanya ialah memperkuat ketergantungan struktural perbatasan terhadap modal, teknologi, serta tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai Tiongkok (Whong, 2020). Secara politik, proyek Laos *GTSEZ* juga merupakan bagian dari strategi *China's peripheral diplomacy*, yaitu pendekatan Tiongkok dalam memperkuat kendali atas wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur, investasi besar-besaran, dan keterikatan ekonomi jangka panjang. Fenomena ini secara bertahap menciptakan model baru dari komodifikasi kedaulatan di mana pemerintah Laos secara sadar mengkomersialkan sebagian kedaulatannya kepada investor Tiongkok dengan imbalan modal investasi dan pembangunan infrastruktur(Laungaramsri, 2015). Tahapan ini kemudian melahirkan situasi *self-imposed extraterritoriality*, ketika negara lemah secara ekonomi menyerahkan sebagian yurisdiksi *de facto* kepada kekuatan ekonomi asing, yang dalam pembahasan ini Laos membuka peluang bagi Tiongkok sehingga sebagian wilayahnya yaitu Laos *GTSEZ* beroperasi di luar kendali penuh hukum Laos(Avary, 2023).

Dari perspektif politik, Laos GTSEZ juga berfungsi sebagai arena eksperimen geopolitik bagi Tiongkok untuk menguji mekanisme *cross-border governance* dan *state making from abroad*. Melalui zona ini, Tiongkok mengembangkan model tata kelola geoekonomi yang menggabungkan fleksibilitas pasar dengan kontrol politik, memungkinkan perluasan kekuasaan lintas batas secara damai namun efektif(Diana, 2017). Secara geopolitik, lokasi Laos *GTSEZ* yang strategis di koridor ekonomi R3 menjadikannya instrumen penting dalam proyek *land-linked connectivity* untuk menghubungkan Yunnan dengan Thailand dan negara-negara ASEAN(SEZO, 2021). Pembangunan infrastruktur transportasi dan jaringan perdagangan di kawasan ini memperkuat kontrol Tiongkok atas arus barang, modal, dan tenaga kerja di subkawasan Mekong, sekaligus memperkokoh *China-centered regional connectivity*(Asian Development Bank, 2018). Selain itu, kepentingan politik Tiongkok diperkuat melalui penggunaan narasi *civilizing mission,* yang membingkai kehadirannya sebagai pembawa pembangunan, modernitas, dan kesejahteraan bagi Laos. Retorika ini berfungsi untuk melegitimasi ekspansi ekonomi sekaligus memperkuat citra Tiongkok sebagai mitra pembangunan yang dermawan(Gong, 2023).

Melalui perpaduan antara perluasan dan penguatan kontrol, integrasi kawasan perbatasan dan penanaman ideologis, Tiongkok menjadikan Laos *GTSEZ* sebagai intrumen dalam membangun dan menegaskan dominasi politik di kawasan perbatasan. Laos GTSEZ berfungsi sebagai *enclave* ekonomi-politik yang memperluas jangkauan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor sentral dalam pembentukan tatanan regional yang berorientasi pada nilai-nilai Tiongkok(Laungaramsri, 2019). Maka dapat dipahami bahwa proyek pengembangan Laos *GTSEZ* ini bukanlah sekedar proyek pembangunan kawasan perbatasan *Golden Triangle*. Akan tetapi, merupakan bagian dari strategi masif yang direalisasikan oleh aktor swasta Tiongkok untuk membentuk ketergantungan ekonomi politik yang terintegrasi dengan kepentingan nasional Tiongkok.

Kepentingan Geopolitik Tiongkok dalam perspektif Rimland Theory Nicholas Spykman

Nicholas Spykman merupakan seorang ahli geopolitik terkemuka yang telah menyumbangkan pemikirannya melalui Rimland Theory. Teori ini menyatakan *"who controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destinies of the world"*(Astarita & Marconi, 2023). Dalam kerangka teori ini, ia menjelaskan bahwa negara-negara sepanjang pesisir Eropa, wilayah Arab-Timur Tengah, serta tanah monson Asia memegang kekuatan kunci untuk menaklukkan Eurasia untuk selanjutnya memiliki nilai strategis dalam menentukan kekuatan global.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

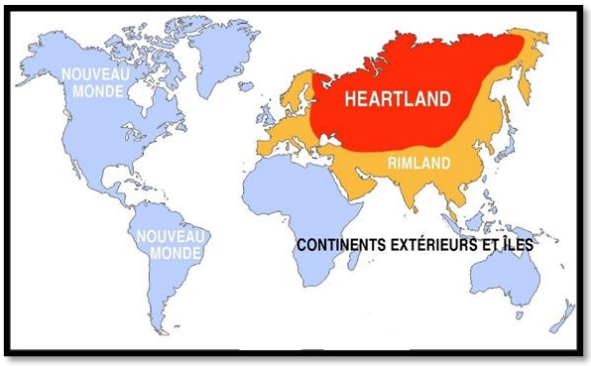

Gambar 1 Peta Rimland Theory

(Sumber: *The Geography of The Peace* (Spykman, 1944))

Wilayah Mekong yang dalam pembahasan ini berfokus pada *Golden Triangle* merupakan salah satu kawasan perbatasan yang masuk dalam pemetaan *rimland* Asia daratan. Selain itu, perbatasan *Golden Triangle* juga berdekatan dengan jalur ekonomi R3 penghubung Tiongkok dan Asia Tenggara.

Kepentingan Ekonomi

Analisis kepentingan ekonomi Tiongkok di Laos *GTSEZ* dapat dipahami melalui *Rimland Theory* yang menekankan pentingnya wilayah perbatasan sebagai ruang proyeksi kekuatan(Spykman, 1944). Kawasan ini terletak di titik pertemuan antara Thailand, Laos, dan Myanmar berdekatan dengan provinsi Yunnan di Tiongkok yang secara langsung menghubungkan jaringan logistik darat dan aliran perdagangan air melalui Sungai Mekong. Posisi geografis tersebut menjadikan Laos *GTSEZ* sebagai bagian dari koridor ekonomi lintas batas yang menghubungkan kawasan Tiongkok ke Asia Tenggara daratan(Chen, 2018).

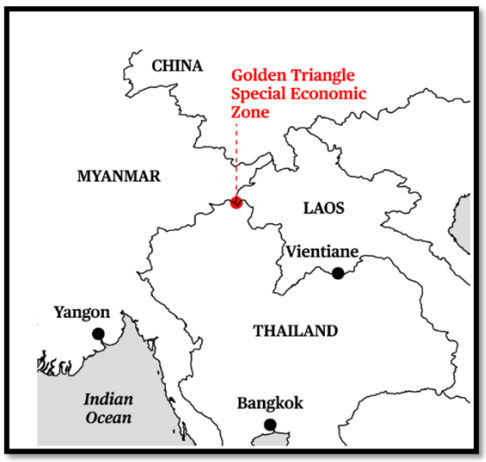

Gambar 2 Peta Golden Triangle Special Economic Zone

(Sumber: *Bloomberg* (M. Campbell & Tanakasempipat, 2024))

Rimland Theory dalam menjelaskan kepentingan ekonomi Tiongkok di Laos *GTSEZ* melalui posisi geografisnya yang berada di tepian daratan Eurasia memperlihatkan karakteristik kawasan penyangga yang menjadi persaingan pengaruh antara kekuatan maritim dan kontinental. Bagi Tiongkok, kawasan ini memiliki nilai strategis karena menjadi akses menuju Asia Tenggara, sekaligus membuka jalur alternatif perdagangan menuju Asia

Tenggara melalui jalur sungai yang membentang dari Yunnan menuju Laos, Thailand, dan Myanmar(Noorali et al., 2022). Sehingga dapat dipahami bahwa keterlibatan Tiongkok melalui investor swastanya yaitu *Kings Romans Group (KRG)* dengan berbagai proyek infrastruktur masif di dalamnya tidak semata-mata sebagai investasi ekonomi biasa melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat konektivitas ekonomi Tiongkok ke rimland Mekong dan dari sana terjadi perluasan jangkauan regionalnya(Campbell & Tanakasempipat, 2024).

Selain itu, dominasi *KRG* di bawah Zhao Wei juga memperlihatkan pola proxy control yang sejalan dengan pandangan Spykman (1994) mengenai pentingnya penguasaan tidak langsung di wilayah *rimland* untuk memproyeksikan kekuasaan ekonomi(Spykman, 1944). Dengan memperoleh konsesi selama 99 tahun dan membangun infrastruktur vital di Laos *GTSEZ*, KRG berfungsi sebagai instrumen non-negara yang memperluas pengaruh ekonomi Tiongkok di luar wilayah kedaulatannya(International Crisis Group, 2023). Hal ini sesuai dengan konsep Spykman (1994) bahwa kekuatan besar tidak serta merta menguasai *rimland* melalui dominasi militer, melainkan dapat dilakukan melalui penetrasi ekonomi, kontrol pada infrastruktur dan penguatan jaringan ketergantungan ekonomi yang mendalam(Sempa, 2015).

Dari sisi ekonomi juga dapat dipahami bahwa keberadaan Laos *GTSEZ* ini memperlihatkan pola integrasi yang memperkuat posisi geoekonomi Tiongkok. Melalui pemanfaatan kelonggaran hukum Laos untuk mengembangkan aktivitas ekonomi yang dibatasi di Tiongkok daratan seperti perjudian. Sehingga, Laos *GTSEZ* menjadi *gray zone* yang berfungsi sebagai laboratorium investasi lintas batas dan tempat uji coba model bisnis semi-legal di bawah pengawasan yang lemah(Ho et al., 2025). Dalam kerangka *Rimland Theory,* kawasan semacam ini memainkan fungsi strategis sebagai titik pijak bagi ekspansi ekonomi sekaligus pengaruh budaya dan sosial Tiongkok ke wilayah Asia Tenggara. Penggunaan mata uang Yuan sebagai alat transaksi utama, dominasi bahasa Mandarin di papan informasi publik, serta tingginya keterlibatan tenaga kerja dan wisatawan Tiongkok menggambarkan bentuk penetrasi ekonomi dan kultural yang memperdalam integrasi Laos *GTSEZ* kedalam jaringan Tiongkok(Chantrawarin, 2024).

Dari berbagai analisis mengenai kepentingan ekonomi Tiongkok di Laos melalui *GTSEZ,* temuan empiris terdahulu oleh Pinkaew Laungaramsi menunjukkan bahwa pemerintah Laos tidak hanya membuka ruang investasi, tetapi turut mengkomodifikasi kedaulatannya dengan memberikan otoritas pengelolaan zona kepada perusahaan Tiongkok, termasuk hak untuk membangun infrastruktur, menentukan tata kelola, dan menjalankan regulasi internal kawasan. Dalam praktiknya, Laos *GTSEZ* beroperasi sebagai *enclave* yang memarginalkan fungsi negara, karena perencanaan dan kontrol teritorial dijalankan langsung oleh investor Tiongkok (Laungaramsri, 2019). Dari fenomena tersebut menghasilkan ruang sosial-ekonomi yang terpisah dari yurisdiksi pemerintah Laos. Selain itu, keberadaan Laos *GTSEZ* juga mendorong *dispossession* terhadap masyarakat lokal yang kehilangan tanah dan tidak terserap dalam ekonomi baru zona tersebut, menghasilkan kondisi *dispossession without development*(Laungaramsri & Sengchanh, 2019). Dengan demikian, jika dilihat dari lensa Spykman (1994) bukan hanya proyek ekonomi, tetapi sebuah instrumen yang memperkuat dominasi geopolitik Tiongkok di *rimland* Asia Tenggara, di mana penetrasi ekonomi menjadi sarana untuk mengurangi ruang manuver negara tuan rumah dan memperluas pengaruh

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Tiongkok di kawasan tersebut(Anwar, 2024).

Kepentingan Politik

Dari perspektif teori geopolitik Nicholas Spykman (1994), keterlibatan Tiongkok di Laos GTSEZ dapat dikategorikan sebagai manifestasi strategi yang selaras dengan prinsip-prinsip *Rimland Theory.* Beliau menekankan bahwa *"who controls the rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destenies of the worlds"* (Spykman, 1944). Hal ini disebabkan oleh posisi rimland sebagai titik temu antara kekuatan darat dan laut, menjadikannya medan kontestasi utama bagi kekuatan-kekuatan besar. Dalam konteks ini, kawasan Laos *GTSEZ* secara geografis termasuk dalam kategori *rimland* strategis di Asia Tenggara(Kliem, 2020). Oleh karena itu, kepentingan Tiongkok di Laos *GTSEZ* tidak sekedar dimotivasi oleh upaya modernisasi melainkan merupakan bagian integral dari ambisinya untuk memperluas pengaruh geopolitiknya.

Apabila menggunakan pendekatan geopolitik *rimland* yang dalam konteks ini Laos *GTSEZ* tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh kekuatan eksternal, sebab kontrol atas wilayah ini akan berujung pada kendali atas jalur perdagangan Sungai Mekong. Dalam kasus Laos *GTSEZ,* Tiongkok memanfaatkan ketergantungan Laos terhadap investasi Tiongkok serta kapasitas negara Laos yang terbatas untuk secara tidak langsung menanamkan kontrol politik(Barney et al., 2025). Pendekatan ini merupakan bentuk klasik dari *political control through economic instrument*, dimana Tiongkok membangun dominasinya melalui penetrasi substansial dalam bentuk investasi infrastruktur, pengaruh sosial-budaya dan integrasi lokal melalui skema kerjasama bilateral yang seringkali timpang. Sesuai dengan pandangan yang menyatakan *"the organization of political, legal, and ideological structures in border regions"*(Spykman, 1944).

Lebih lanjut, *Rimland Theory* juga membantu menjelaskan bagaimana kepentingan politik Tiongkok melalui proyek Laos *GTSEZ* merupakan bentuk akulturasi dari kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kontrol kawasan perbatasan. Spykman (1994) menegaskan bahwa *"the power struggles of the Eastern Hemisphere have always been fought in reference to the relations between hearthland and rimland"*(Spykman, 1944). Dalam hal ini, kebijakan *Going Out Policy* yang diinisiasi oleh Tiongkok pada awal 2000-an dapat dilihat sebagai strategi untuk memastikan bahwa kawasan *rimland* Asia Tenggara tetap berada di bawah orbit pengaruhnya, sebagaimana Spykman (1994) memandang dominasi atas *rimland* sebagai garansi keamanan dan hegemoni bagi kekuatan besar(Wang, 2016).

Selanjutnya, Laos *GTSEZ* juga dapat dilihat sebagai arena eksperimen geopolitik bagi Tiongkok dalam menguji model tata kelola lintas batas yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan tujuan politik(Luzzu, 2023). Dalam analisis *Rimland Theory* kekuasaan di *rimland* tidak hanya diperoleh melalui kontrol militer, melainkan *"the ability to regulate the political and ideological structures of peripheral states"*(Spykman, 1944). Dalam hal ini, Laos *GTSEZ* menjadi wadah bagi Tiongkok untuk memperluas kapasitas pengaruhnya terhadap negara tetangga, baik secara administratif maupun simbolik. Ketergantungan Laos terhadap Tiongkok semakin mempersempit ruang kedaulatannya, sehingga menjadikan Laos *GTSEZ* sebagai titik tumpu yang memperkuat hegemoni Tiongkok di sub kawasan Mekong(Rippa, 2019). Selain aspek politik struktural, Tiongkok membingkai keterlibatannya dalam narasi ideologis yang disebut *civilizing mission.* Narasi ini menampilkan Tiongkok sebagai pembawa modernitas dan kesejahteraan, yang secara retoris digunakan untuk melegitimasi

ekspansi politiknya di kawasan *rimland* Asia Tenggara(Gong, 2023). Dalam konteks ini, strategi Tiongkok mencerminkan yang dikemukakan oleh Spykman (1994) sebagai bentuk *geopolitical legitimation*, yaitu upaya memperoleh penerimaan terhadap dominasi melalui argumentasi moral dan pembangunan(Spykman, 1944).

Dengan menggunakan pendekatan *Rimland Theory,* jelas bahwa kepentingan utama Tiongkok di Laos *GTSEZ* bersifat geopolitik dan politis. Melalui proyek ini, Tiongkok memperluas pengaruhnya di kawasan perbatasan, mengamankan jalur konektivitas strategis di Sungai Mekong, dan memperkuat posisi hegemoninya di Asia Tenggara(Diana, 2017). Laos *GTSEZ* juga terbukti bukan sekedar realisasi dari kepentingan ekonomi Tiongkok, tetapi merupakan manifestasi dari logika geopolitik Spykman (1994) di mana penguasaan terhadap *rimland* berarti menguasai tatanan kekuatan di Eurasia(Spykman, 1944). Dengan demikian, proyek Laos GTSEZ dipahami sebagai instrumen politik yang digunakan Tiongkok untuk memperluas jangkauan kekuasaan dan menegaskan dominasinya dalam pembentukan tatanan regional baru yang berorientasi pada nilai-nilai dan kepentingan politik Tiongkok.

KESIMPULAN

Pembangunan Laos *GTSEZ* mencerminkan strategi geopolitik Tiongkok di Asia Tenggara, di mana kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh di wilayah *rimland,* sesuai dengan teori Nicholas Spykman. Melalui investasi besar di sektor pariwisata, pelabuhan, dan transportasi, Tiongkok memperkuat integrasi ekonomi antara Yunnan dan kawasan Mekong, meskipun dominasi aktor Tiongkok turut menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi dan ketergantungan Laos. Secara politik, *GTSEZ* menjadi sarana implementasi *Going Out Policy* dan *peripheral diplomacy,* yang mengintegrasikan Laos ke dalam orbit ekonomi-politik Tiongkok serta memunculkan *self-imposed extraterritoriality* yang menggeser aspek kedaulatan Laos. Dalam perspektif *Rimland Theory*, penguasaan ruang strategis di perbatasan Laos–Thailand–Myanmar memperkokoh posisi Tiongkok dalam percaturan geopolitik regional. Dengan demikian, Laos *GTSEZ* memiliki dimensi ganda sebagai proyek ekonomi dan instrumen hegemoni geopolitik Tiongkok, yang membawa peluang pembangunan namun juga risiko ketergantungan, hilangnya sebagian kedaulatan, dan potensi ketegangan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdussamad, Z. (2021). Hakikat. In *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 47–52).
[2] Akartuna, A. (2025). *What's it like in the Golden Triangle Special Economic Zone – the Mekong's organised crime and scam empire? | LinkedIn*. https://www.linkedin.com/pulse/whats-like-golden-triangle-special-economic-zone-mekongs-akartuna-d6mpc/
[3] Ammar, H. (2023). *The Golden Triangle: Opium Production Centre...* Paradigm Shift. https://www.paradigmshift.com.pk/the-golden-triangle/?
[4] Anwar, A. (2024). Heartland vs . Sea Power : Why the Rimland Will Shape the Future of World Order. *E-International Relations*, 1–5.
[5] Asian Development Bank. (2018). *The Role Of Special Economic Zones In Improving*

Effectiveness Of Greater Mekong Subregion Economic Corridors.
[6] Astarita, C., & Marconi, M. (2023). *Reading Spykman in Beijing*. 1–8.
[7] Avary, M. (2023). *Lao assembly rejects SEZ bill*. Radio Free Asia. https://www.rfa.org/english/news/laos/laos-sez-law-11282023124612.html
[8] Barney, K., Rajah, R., & Cooray, M. (2025). *Trapped in debt: China's role in Laos' economic crisis*. Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/publications/trapped-debt-china-s-role-laos-economic-crisis
[9] Campbell, M., & Tanakasempipat, P. (2024, August 19). *Golden Triangle: How Crypto Scammers Found A Criminal Paradise in Laos*. https://www.bloomberg.com/features/2024-golden-triangle-special-economic-zone/
[10] Center, S. (2021). *Lao People's Democratic Republic*. https://www.stimson.org/2021/lao-peoples-democratic-republic/
[11] Chantrawarin, Y. (2024). *Strategic Implications of China ' s Economic Influence in Lao SEZs : Patterns and Security Dynamics in Thailand ' s Golden Triangle*. *13*(2). https://doi.org/10.14456/connexion.2024.11
[12] Chen, X. (2018). *Rethinking Cross-Border Regional Cooperation : A Comparison of the China- Myanmar and China-Laos Borderlands*. *March*.
[13] Chouvy, P. A., & Meissionnier, J. (2024). The Historical and Geographic Context of the Golden Triangle. In *Yaa Baa Production, Traffic and Consumption of Methamphetamine in Mainland Southeast Asia Chapter*.
[14] Dahal, D. R. (2024). The Shifting Geopolitics. *Journal of Political Science*, *24*(February), 185–201. https://doi.org/10.3126/jps.v24i1.62863
[15] Desai, P. N. (2021). The Changing World Geopolitics. *International Relations*, 816–819.
[16] Diana, A. (2017). *Liquid Labourscape: Ad Hoc Experimentation in a Chinese Special Economic Zone in Laos*. *2*(3).
[17] Gong, B. X. (2023). *The Mekong Region Is a Test of China ' s Global Development and Security Model*. 1–11.
[18] Ho, S., Gong, X., & Freeman, C. P. (2025). China's Interventions in 'Gray Special Economic Zones' in Southeast Asia's Borderlands. *Journal of Contemporary China*, *00*(00), 1–17. https://doi.org/10.1080/10670564.2025.2484205
[19] Huaxia. (2024). *New international airport opens in northern Laos*. https://english.news.cn/20240205/4fbe45832bb044acb561649744dfbeb9/c.html
[20] International Crisis Group. (2023). *Transnational Crime and Geopolitical Contestation along the Mekong*. *August*.
[21] International Crisis Group. (2024). *Stepping into South East Asia's Most Conspicuous Criminal Enclave*. https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/south-east-asia/stepping-south-east-asias-most-conspicuous-criminal-enclave
[22] Inthaphonh, L. (2021). *Special Economic Zones in Lao PDR*. 1–14. www. Laosez.gov.la
[23] Kliem, F. (2020). *THE GEOPOLITICS OF THE MEKONG AND A RADICAL PROPOSAL FOR ASEAN TO NAVIGATE IT*. *November*.
[24] Lao news Agency. (2024, February 5). *Bokeo newly-built international airport opened*. https://kpl.gov.la/En/detail.aspx?id=80238
[25] Lao PDR Prime Ministers Office. (2010). *Decree on Special Economic Zone and Specific*

Economic Zone in the Lao PDR. 1–26.
[26] Laotian Times. (2020, October 6). *Osiano Trading to Develop Port at Ban Mom - Laotian Times*. https://laotiantimes.com/2020/10/06/osiano-trading-to-develop-port-at-ban-mom/
[27] Laungaramsri, P. (2015). Commodifying Sovereignty: Special Economic Zones and the Neoliberalization of the Lao Frontier. *Impact of China's Rise on the Mekong Region*, *3*(1), 117–146. https://doi.org/10.1057/9781137476227_5
[28] Laungaramsri, P. (2019). China in Laos: Enclave spaces and the transformation of borders in the Mekong Region. *Australian Journal of Anthropology*, *30*(2), 195–211. https://doi.org/10.1111/taja.12319
[29] Laungaramsri, P., & Sengchanh, S. (2019). Negotiating post-resettlement livelihoods: the Chinese special economic zone and its impact in northwestern Laos. *Canadian Journal of Development Studies*, *40*(4), 482–498. https://doi.org/10.1080/02255189.2019.1524748
[30] Leong, L. K. (2021). *Golden Triangle: Spies, Warlords and Drug Kingpins | Maritime Fairtrade*. https://maritimefairtrade.org/golden-triangle-spies-warlords-drug-kingpins/
[31] Li, D., & Wang, X. (2021). Land-use change and efficiency in laos' special economic zones. *Land*, *10*(10). https://doi.org/10.3390/land10101012
[32] Luzzu, J. (2023). Contested Borderlands: Experimental Governance and Statecraft in the Laos Golden Triangle Special Economic Zone. *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*, 496. https://doi.org/10.4337/9781788974912.S.41
[33] Morgenthau, H. J. (1949). Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. In *International Affairs* (Vol. 25, Issue 2, pp. 192–192). https://doi.org/10.2307/3017382
[34] Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
[35] Noorali, H., Flint, C., & Ahmadi, S. A. (2022). *Port Power : Toward a New Geopolitical World Order*. *October*.
[36] Pedroletti, B. (2025). *Le Laos en voie de satellisation chinoise*. https://www.lemonde.fr/international/article/2025/06/29/le-laos-en-voie-de-satellisation-chinoise_6616357_3210.html
[37] Phommachanh, N. (2024). The Impact of Special Economic Zones on Economic Development: Evidence from Nightlight Analysis in the Lao People's Democratic Republic. *Asian Development Review*, *41*(2), 81–105. https://doi.org/10.1142/S0116110524400109
[38] Reuters. (2018). *U.S. slaps sanctions on Laos Golden Triangle "casino" in bid to break up narco-empire*. https://www.reuters.com/article/world/us-slaps-sanctions-on-laos-golden-triangle-casino-in-bid-to-break-up-narco-e-idUSKBN1FK1OS/
[39] Ribó, I. (2022). Golden Triangle: A Material-Semiotic Geography. *ISLE Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, *29*(3), 751–770. https://doi.org/10.1093/isle/isaa140
[40] Rippa, A. (2019). Zomia 2.0: branding remoteness and neoliberal connectivity in the

Golden Triangle Special Economic Zone, Laos. *Social Anthropology*, *27*(2), 253–269. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12649

[41] Sempa, F. P. (2015). *Nicholas Spykman and the Struggle for the Asiatic Mediterranean*. The Diplomat. https://thediplomat.com/2015/01/nicholas-spykman-and-the-struggle-for-the-asiatic-mediterranean/

[42] Setiawati, S. (2023). *Satu Dekade OBOR China: Dunia Ikut Untung atau Buntung?* CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230915072010-128-472641/satu-dekade-obor-china-dunia-ikut-untung-atau-buntung

[43] SEZO. (2021). *Special Economic Zones in Lao PDR*. www. Laosez.gov.la

[44] Sims, K. (2017). Gambling on the future: Casino enclaves, development, and poverty alleviation in laos. *Pacific Affairs*, *90*(4), 675–699. https://doi.org/10.5509/2017904675

[45] Spykman, N. J. (1944). *The Geography of the Peace*.

[46] Sun, M., Song, T., & Liu, W. (2022). *Rejuvenating SEZs through Internationalization : A Case Study of Chinese Domestic and International SEZs*. 1–13.

[47] Tan, D. (2017). Chinese Enclaves in the Golden Triangle Borderlands: An Alternative Account of State Formation in Laos. In *Chinese ENCOUNTERS in Southeast Asia How People, Money, and Ideas from China Are Changing a Region* (p. 136).

[48] Technical Policy Brief. (2024). *Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud , Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia : A Shifting Threat Landscape October 2024*. *October*.

[49] Wang, H. (2016). *A DEEPER LOOK AT CHINA ' S " GOING OUT " POLICY*. *March*.

[50] Wardhana, A. (2018). Grand Strategy Obama: Pivot to Asia. *Jurnal Global & Strategis*, *12*(1), 59. https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.59-77

[51] Whong, E. (2020). *Chinese Casino Kingpin Behind New Mekong Port to Serve Golden Triangle SEZ in Laos*. Radio Free Asia. https://www.rfa.org/english/news/laos/port-10072020195319.html

[52] Wijatmadja, A. S. (2015). Perkembangan Studi dan Pendekatan dalam Ilmu Hubungan Internasional. In *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (pp. 25–47).

[53] Zulkarnain, Z., Saragih, H. M., Rambe, S., & Hendrajit, H.-. (2018). Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik, Apa Geopolitic Leverage Indonesia ? *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *3*(6), 721–732. https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.469

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)